

Refleksi Metafisis Atas Pancasila

Oleh Made Pramono¹

Abstract

Pancasila is Indonesian's Philosophy. As philosophical concept, Pancasila has three dimensions: ontology, epistemology, and axiology. This article will not discuss all of this, but to reflect in a metaphysical base which focus in ontological status of Pancasila. This metaphysical reflection will use Phenomenology-Existensialism and Critical Theory in regard to objectivity the subjectivity of reflection.

Key word: Pancasila, First Principles, Metaphysical Reflection

1. Titik Pijakan Orientasi Teoritis, Praktis, dan Organik

Pancasila adalah dasar filsafat bangsa Indonesia, atau dalam istilah Soekarno (dalam Bahar, (ed.), 1995: 63) disebut sebagai *Philosophische Grondslag*. Pancasila bisa disebut sebagai *The Five First Principles*. Status Pancasila sebagai *First Principles* bagaimanapun mengandaikan suatu kajian metafisis, baik sebagai teori maupun proses kegiatan berpikir yang khas. Ini tidak lepas dari watak dasar metafisika yang mengindikasikan “pencarian tiada akhir” (Sontag, 1970: 13-15). Pencariartian tiada akhir ini berkenaan dengan konsep universal yang menjadi *first principles*. Abdul Kadir Besar (1994: 16-17) mengidentifikasi konsep universal yang terkandung dalam tiap sila dari Pancasila, yakni: Tuhan, manusia (makhluk individu dan sekaligus sosial), integralitas unsur-unsur, masyarakat, dan keadilan.

Pancasila sebagai simbol tidak akan pernah tertafsir secara tuntas (Dibyasuharda, 1990: 239-241). Ini memiliki konsekuensi metodologis terutama terkait dengan titik pijak Filsafat Pancasila: apakah Pancasila sebagai *genetivus subjectivus*, ataukah *genetivus objectivus*, atau pula sebagai medan terpadu komunikasi/dialog? Sebagai “hakikat simbol”, Pancasila tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi berbicara tentang yang disimbolkannya. Di sisi lain, ini menyangkut pula peran Pancasila dalam penjiwaan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penulis lebih menganggap Pancasila lebih tepat

¹ Made Pramono adalah dosen FIK dan koordinator MPK&K Filsafat Ilmu UNESA.

sebagai medan dialog/komunikasi yang secara organis mempersatukan gerak dinamis bangsa Indonesia dalam penafsiran konseptual dan kontekstual yang tidak meninggalkan *First Principles* dalam sifat keabadiannya.

Makalah ini melibatkan pandangan pribadi penulis dalam membentangkan dan menyelami Pancasila. Tetapi sifat keilmiahan tetap dijaga dalam penulisan ini. Oleh karena itu, pandangan para filsuf terkemuka seperti Husserl (dengan fenomenologi transendental-nya sebagai pendekatan/titik pijak utama tulisan ini), Heidegger (konsep *Being* dan *beingness* sebagai cakrawala ontologis penulisan) serta beberapa pemikir lain, pisau analisisnya berguna dalam membantu dan mendukung refleksi penulis. Tentu saja keilmiahan tulisan ini masih tetap harus diuji secara kritis, karena hasil refleksi metafisika atas Pancasila tidak lepas dari permasalahan cara atau metode penelitian, sistematika, serta sifat universalitasnya.

Penulis berharap refleksi ini dapat memberikan suatu perspektif baru tentang Pancasila, baik di tingkat teoritis, praktis dan organis. Di tingkat teoritis, persoalan terkait Pancasila sebagai *The Fife First Principles* adalah: kriteria dasar apa yang memadai untuk melihat kemengadaan Pancasila dengan *first principles*-nya? Menurut Sontag (1970: 1-3), metafisika secara tradisional membatasi diri pada persoalannya sendiri, yakni terkait dengan *first principles* sejauh itu terkait dengan struktur ada ataupun makna eksistensi manusia. Lalu, bagaimana metafisika menjelajahi struktur ada maupun makna eksistensi manusia dalam kaitannya dengan Pancasila?

Penulis menyandarkan orientasi praktis pada konsep *postmetaphysical thinking*-nya Habermas yang merekonstruksi klaim kognitif metafisika tentang realitas dan beranjak menuju filsafat yang “komunikatif” kepada keseluruhan hidup praktis (Habermas, 1992: 13-14). Ini menyangkut tindakan manusia Indonesia dalam ber-Pancasila.

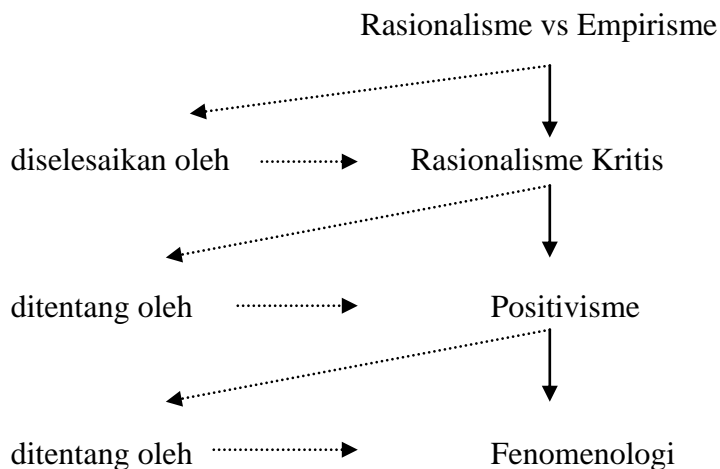
Orientasi organis dalam refleksi ini diawali dengan permasalahan yang tetap dan yang berubah dalam Pancasila dan persoalan utamanya: bagaimana mensiasati jeda tafsiran konseptual (dan perkembangan isu mutakhir) dengan tafsiran kontekstual? Pada dataran mana Pancasila menegaskan *first principles*-nya yang tetap dan di dalam konteks apa *first principles* tersebut dinamis dan organis, menjiwai perubahan demi perubahan dalam masyarakat?

2. Fenomenologi Transendental dan Cakrawala Kemengadaan

Penulis berasumsi bahwa titik pijak berfilsafat adalah pernyataan manusia terhadap dirinya sendiri. Dalam bahasa Dondeyne (dalam Luijpen, 1960: xi), “*what philosophy want is to reveal man to himself*”. Sesuatu deskripsi tentang hakikat manusia akan mengantar pada pemahaman tentang keberadaan manusia. Pemahaman tentang keberadaan manusia pada gilirannya akan membimbing kepada pemahaman tentang Ada (Jones, 1975: 294). Dengan berawal dari pengenalan terhadap diri sendiri, kemudian diteruskan dengan penjelajahan terhadap semesta keberadaan, maka manusia sampai pada pengenalan Ada Absolut. Oleh karena itu, sebelum menjelajah tentang Ada dan cakrawala kemengadaan (dipelopori di dalam sejarah filsafat oleh Heidegger), konsepsi reflektif tentang Aku-transendent dan aku-operasional akan diuraikan terlebih dahulu dalam kerangka pendekatan fenomenologi transendental Edmund Husserl.

Penulis mengambil fenomenologi Husserlian sebagai cara berpikir (*way of thinking*) dalam merefleksi Pancasila. Dalam sejarah filsafat, fenomenologi lahir menentang paham antimetafisika dari positivisme dan dilaterbelakangi oleh kepedulian akan makna (Husserl, 1982: 23). Melalui pendekatan fenomenologi ini, diharapkan Pancasila dapat dirumuskan secara lebih arif, tanpa terjebak pemahaman yang terlalu positivistik.

Secara skematis, kelahiran fenomenologi bisa digambarkan sebagai berikut:



Semboyan fenomenologi adalah *Zu den Sachen Selbst*, “kembalilah pada objeknya sendiri”. Dengan semboyan itu, fenomenologi sebenarnya lebih diperlakukan sebagai metode berpikir, sebagai ajaran epistemologi. Fenomenologi adalah metode berpikir yang mengajarkan agar subjek dibebaskan dari segala macam pengaruh, apriori, antipati sedemikian rupa sehingga subjek sepenuhnya memperhatikan objek (Husserl, 1982: 123).

Objek dipandang secara rohani dengan suatu intuisi melalui tiga (3) macam reduksi/*epokhe* sebagai berikut:

1. Reduksi fenomenologi

Objek dipandang dan gejala yang nampak diamati dengan penuh kesadaran. Yang menampak adalah sekedar gejala, bukan hakikat kenyataan yang sebenarnya. Karena itu subjek tidak menyatakan suatu *statement* dan hal yang fenomenal aktual kemudian diletakkan dalam kurung. Tujuannya adalah agar menemukan gejala yang sebenarnya dengan memasuki dan mengamati objek dari dalam. Subjek menyatu dengan objek.

2. Reduksi Eidetis (*eidōs* = hakikat)

Semua yang aksidensial (ruang, waktu, kedudukan dan sebagainya yang bukan hakiki) kita batin dan diletakkan dalam kurung. Tujuannya adalah mencari struktur dasar untuk menemukan sesuatu yang disebut hakikat/*wissenschaft*.

3. Reduksi Transendental.

Segala macam pengetahuan dan apriori diletakkan. Unsur subjektif yang disebut “aku-empirik” atau dalam “aku-operasional” juga dilepaskan. Agar yang tertinggal hanyalah kesadaran murni atau kesadaran transendental. Aku yang ada adalah “aku-transendental”. Kesadaran transendental dikembangkan untuk mencapai suatu tingkatan *Erlebnisse* (jiwa yang sudah *suwung*), yang merupakan tempat atau wadah untuk mengkonstitusikan pengetahuan. Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang substantif di mana terdapat kesesuaian antara makna dengan apa yang dianalisa secara rohani (lihat Husserl, 1970: 43-50).

Dari ketiga macam reduksi tersebut tampak bahwa tolok ukur kebenaran dalam pengetahuan adalah intersubjektif. Kelemahan fenomenologi adalah bahwa pengetahuan yang subjektif sulit diukur validitasnya, sedangkan kelebihanannya adalah bahwa sesuatu yang maknawi diunggulkan mengatasi ukuran positivistik. Kenyataan akan kebenaran itu

adalah suatu keniscayaan yang tak terbantahkan, misalnya keadilan, kebenaran, kebebasan dan sebagainya.

Bila ini diterapkan pada Pancasila, maka kebenaran semua *first principles* dalam Pancasila tolok ukur pertamanya adalah inter-subjektivitas warga negara Indonesia. Meskipun demikian, inter-subjektivitas ini berangkat dari nilai-nilai apa yang disebut William Dilthey sebagai *erlebnis* (pengalaman hidup, *lived experience*), yakni pengalaman yang dialami dalam kehidupan yang di dalamnya terdapat suatu pemahaman langsung tentang tujuan, intensi, dan makna dalam arti psikisnya. Pengalaman ini memiliki hubungan dengan realitas nyata sebagaimana bersandar pada kategori makna yang dimilikinya. Pengalaman ini merupakan kesatuan yang membawa sekaligus ke dalam ingatan hal-hal yang telah dialami maupun dialami kembali. Makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut bukanlah suatu kesatuan yang terletak di luar pengalaman (Dilthey, dalam Howard, 1982: 16).

Berkaitan dengan adanya nilai-nilai mendasar yang menjadi ciri khas dan cita-cita manusia universal, dan oleh karena pergaulan internasional dan jangkauan pengetahuan yang bisa jadi sangat provokatif dan universal, inter-subjektivitas bangsa Indonesia dalam wilayah ontologis mendasar terkait erat dengan universalitas nilai-nilai warga dunia. Misalnya konsep keadilan, yang inter-subjektivitas bangsa Indonesia mengkonsepsikannya sesuai *erlebnis*-nya, memiliki interpretasi universal yang sesuai dengan sifat dasar kemanusiaan.

Erlebnis bergerak di wilayah “aku-empirik” atau “aku-operasional”. Padahal dalam fenomenologi transendental, kesadaran yang masih “empirik” ini harus ditinggalkan dalam rangka mencapai kesadaran transendental, atau “aku-transendental” yang dikembangkan dalam *erlebnisse*, jiwa yang sudah kosong dari angan-angan fenomena menipu, jiwa murni. Tarik menarik antara *erlebnis* dengan *erlebnisse* ini menyangkut *trancendental point* dalam memandang fenomena yang ada, khususnya tentang manusia.

Bila dalam *erlebnis* tidak ada titik transendental dalam memandang manusia, lantas bagaimanakah realitas objektivikasi makna *The Five First Principles* (Pancasila) dalam simbol dapat terjadi? Dilthey, sebagai pengembang fenomenologi kemudian, menunjuk pada...

“...common conditions and epistemological instrument, must everywhere present the same characteristics” (Dilthey, dalam Howard, 1982: 16).

Husserl berpendapat bahwa kesadaran menurut kodratnya terarah pada realitas. Kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu. Kesadaran selalu bersifat intensional sebagai struktur hakiki kesadaran (Bertens, 1983: 101). Kesadaran murni dengan demikian berarti kesadaran yang terarah pada realitas murni, transenden dan mengatasi kelokalan realitas empirik.

“Aku-transendental” berawal dari “aku-empirik” yang menemukan keuniversalan, menemukan kebenaran yang mengatasi subjektivitas, sekaligus meninggalkan “keakuan operasional-empirik” menuju “keakuan transendental” yang menyatu dalam kebenaran ontologis universal.. Sesuai fenomenologi transendentalnya Husserl, melalui reduksi transendental, “aku-empirik” ditinggalkan, subjek masuk ke dalam objek dengan kesadaran murni. “Aku-transendental” menggantikan posisi “aku-empirik” dalam memandang objek. Pancasila dipandang dari “aku-transendental” memiliki *first principles* yang universal, abadi. Namun demikian, pada dataran “aku-operasional-empirik” *five first principles* dalam Pancasila tidak akan memiliki gema pragmatis-fungsionalnya bila tidak diturunkan dalam kaidah-kaidah atau ko-eksistensi-ko-eksistensi yang dalam arti tertentu bersifat lokal, *culture-oriented* dan berubah.

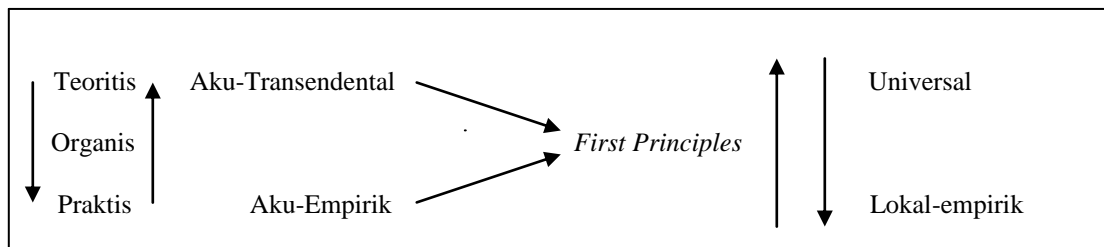
Persoalan yang muncul kemudian adalah, apakah konsekuensi dari “aku-empirik” sudah dipertimbangkan tidak menyalahi prinsip ber-metafisika? Metafisika secara tradisional “membatasi diri” pada persoalan-persoalannya sendiri, yakni terkait dengan *first principles* sejauh terkait dengan struktur ada dan eksistensi manusia (Sontag, 1970: 1-3). Dengan demikian tuntutan untuk berrefleksi dengan titik pijak orientasi lokal (berbangsa dan bernegara) dan bukan universal (eksistensi manusia) tentu merupakan keanehan. Metafisika sendiri secara tradisional tidak berurusan dengan hal-hal individual sebagaimana diurus oleh ilmu-ilmu khusus, melainkan berurusan dengan sesuatu yang fundamental dan komprehensif (White, 1987: 1). Metafisika berurusan dengan “ada” sebagai “ada”, dengan “keberbedaan” sebagai “keberbedaan”, dengan “menjadi” sebagai “menjadi” (Luijpen, 1960: 57).

Garis batas antara “aku-transendental” dengan “aku-empiris” tidak analogal dengan garis batas antara metafisika dengan ilmu-ilmu khusus seperti ilmu politik, ilmu

hukum atau bahkan dengan filsafat Pancasila sekalipun. Kunci permasalahannya adalah pada cara pendefinisian “aku-empirik” dalam kaca mata fenomenologi transendental.

“Aku-transendental” mendapatkan kesadaran murni dari meninggalkan “aku-empirik”. Tetapi “aku-empirik” bukanlah semata-mata unsur subjektif yang secara ontologis berkuat dengan pengetahuan keseharian, *common sense*, yang berlumuran interpretasi empiris melulu. “Aku-empirik” pada ranah metafisika fenomenologi eksistensial bergerak di wilayah pengada-pengada, yang menjadikan Ada diinterpretasikan sebagai *Being-Process*, sedangkan “Aku-transendental” menjadikan Ada sebagai Ada dalam subordinasi pengada-pengada (Heidegger, 1962; lihat juga O’Connor, dalam Dahlstrom, 1987: 151).

Skema berikut ini disajikan sebagai hasil refleksi sementara dan sekaligus bahan untuk refleksi lebih lanjut:



Skema 2: Aku-Transendental dan Aku-Empirik –yang menunjukkan kualitas teoritis, praktis dan organis –mencerap *first principles* dengan dasar yang sama tetapi cakrawala yang berbeda.

Refleksi penulis sejauh ini mulai beranjak dari diskusi “aku-transendental” dan “aku-empirik” yang berasal dari fenomenologi transendental, menuju cakrawala kemengadaan. Cakrawala kemengadaan (*seiendheit, beingness*) menempati posisi esensial dalam pemikiran Heidegger. Persoalan terkait Pancasila sebagai *The Fife First Principles* pada dataran ini adalah kriteria dasar apakah yang memadai untuk melihat kemengadaan Pancasila dengan *first principles*-nya? Bagaimana pula metafisika menjelajahi “struktur ada” dalam kaitannya dengan “makna eksistensi manusia” dalam lingkup Pancasila?

Penulis mencoba untuk bereksperimen dengan mengintegrasikan pemikiran “aku-transendental” dan “aku-empirik” dari Husserl dengan pemikiran “Ada” dan “pengada” dalam filsafat eksistensial Heidegger. Bagaimana tata hubungan sila-sila dalam Pancasila dengan nilai-nilai universal, abstrak dan abadi di satu pihak dan dengan nilai-

nilai konkrit, lokal dan dinamis di lain pihak? Dalam tata hubungan itu, bagaimana “aku-transendental” dan “aku-empirik” berkesepahaman dengan “ada” dan “pengada-pengada”? (Dalam bahasa filsafat hukum: Pancasila sebagai sistem nilai dihubungkan dengan Pancasila sebagai sistem norma).

Cakrawala kemengadaan adalah bersifat komprehensif. Ini inherent dalam makna Ada itu sendiri. Untuk mengetahui Ada, maka harus dibuka dahulu rumah Ada, yakni bahasa, yang menghubungkannya dengan misteri eksistensi (Lemay and Pitts, 2001: 87). Refleksi penulis tidak akan menyelami tentang ‘rumah Ada’ secara komprehensif, tetapi hanya sejauh terkait dengan permasalahan yang ‘menggantung’ di atas.

Pemikiran metafisis Heidegger tentang $\sigma\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$, yang dia terjemahkan dengan *Seiendheit*, yang berbeda dengan *Sein* menempati posisi kunci dalam mengurai status ontologis nilai-nilai Pancasila. *Seiendheit* berarti *beingness*, kemengadaan. Dalam “Pengantar” pada bukunya “What Is Metaphysics?”, Heidegger menegaskan bahwa

“metafisika selalu merepresentasikan yang ada sebagaimana adanya dalam totalitasnya; ia berhubungan dengan cakrawala kemengadaan pengada-pengada” (Heidegger, 1971: 137).

Dalam *What Is Philosophy?* Heidegger mengklaim bahwa bagi filsafat, “Yang Ada dari pengada-pengada tinggal dalam cakrawala kemengadaan” (O’Connor, 1987: 151).

Heidegger secara tegas kemudian menyatakan bahwa Ada adalah subordinasi pengada-pengada. Di dalam “Letter on Humanism” (1971: 204), Heidegger menulis:

Man first clings always and only to beings. But when thought represents beings as beings it n o doubt refers to Being. Yet, in fact, it always thinks only of beings as such and never of Being as such. The (metaphysical) “question of Being” always remains the questions of beings... ”

Heidegger menegaskan bahwa karakter metafisis dari perbedaan ontologis di mana Yang Ada dipikirkan dan diterima demi pengada-pengada, menunjukkan bahwa Ada tunduk pada pengada-pengada. Dengan demikian, bagi Heidegger meskipun metafisika merupakan pencarian Yang Ada (*Sein*), tetapi *Sein* ini sesungguhnya hanya *Seiendheit*, cakrawala kemengadaan pengada-pengada (O’Connor, 1987: 152).

Apa implikasi kontekstualnya bagi metafisika Pancasila? Menurut teori Heidegger ini jelas, bahwa asas pertama, *first principles*, subordinat dan tunduk pada cakrawala kemengadaan atau – dalam kontekstualnya, kelima sila Pancasila (Ketuhanan,

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sebagai konsep universalnya) adalah *Sein* dalam status ontologis Heideggerian, dan sesungguhnya ini subordinat dan tunduk pada horizon ke-Indonesiaan, cakrawala kenegaraan dalam warna budaya, tradisi dan muatan-muatan lokal Indonesia. Di sisi lain, bisa jadi *Sein* ini tunduk pada cakrawala kemengadaan yang lebih luas, yakni keuniversalan umat manusia.

Seperti yang telah dikutip di atas dari “Letter on Humanism”, Heidegger mengatakan bahwa manusia pertama-tama selalu dan hanya berpegang teguh pada pengada-pengada, meskipun melalui pemikiran yang konsisten ini bisa mengantar pada Yang Ada. Cakrawala kemengadaan berarti berpeluang sebagai pedoman pertama dan utama bagi manusia. Ketika manusia belum mengenal dan menyerap nilai-nilai normatif, sesungguhnya manusia sudah mengalami realitas. Sebagai pengada, manusia (bersama-sama dengan pengada lain seperti alam dan Tuhan) membentuk tatanan realitas yang lebih rumit dengan hadirnya nilai-nilai. Fakta membentuk nilai. Nilai ini sendiri pada gilirannya melarut dalam kemanusiaan universal yang hadir sebagai Yang Ada. Dengan demikian, nilai-nilai subjektif dalam interaksi dan realisasinya kemudian membentuk inter-subjektivitas yang meningkat lagi menuju objektivikasi universal, tanpa harus sama sekali kehilangan muatan lokalnya. Demikianlah refleksi penulis dalam menafsirkan secara metafisis kaitan antara nilai Pancasila dengan nilai-nilai subjektivitas-lokal dan nilai-nilai intersubjektivitas/objektivitas universal.

Ada implikasi lain dari konsep Heidegger ini. Ketercakrawalaan manusia pada pengada-pengada ini mempengaruhi watak ontologis ideologi-ideologi yang dibangunnya. Kapitalisme, sosialisme, dan komunisme mendasarkan diri pada watak humanisme-sekuler, yang dibentuk berdasarkan tempat pengada-pengada uang, modal, kemanusiaan pragmatis, kekuasaan dan sebagainya dalam cakrawala kemengadaan yang mereka percaya. Penulis menskemakan sebagai berikut:

Paham	Pengada Utama	Cakrawala Kemengadaan*
Marxisme	Manusia --- Ekonomi	Humanisme Sekuler Kolektif Dialektik alamiah
Sosialisme	Manusia --- Sosial-Ekonomi	Humanisme Sekuler Kolektif Reformasi secara etis
Komunisme	Manusia --- Politik-Ekonomi	Humanisme Sekuler Kolektif Dialektik Revolusi-Partai Komunis
Kapitalisme	Manusia --- Ekonomi Tuhan --- Negara Netral	Humanisme Sekuler Individual <i>Laisser-faire, laisser passer</i>
Pancasila	Manusia --- Sosial-Budaya Tuhan --- Toleransi Agama	Antropo-Religiosus Centris Individu & Sosial Hukum (?)

* Penulis berhutang budi pada makalah seorang kawan yang mendahului mensketsakan cakrawala kemengadaan dalam tesis Being-Having-Doing. Di sini penulis menambahkan beberapa hal penting lain.

Implikasi metafisika ke arah ilmu-ilmu khusus semacam ilmu politik seperti yang penulis sketsakan tentu memiliki syarat tapal batas yang jelas dan terang. Ini dalam rangka menjaga disiplin keilmuan yang ada. Lebih dari itu, penulis yakin bahwa pelarutan beberapa ilmu khusus ke dalam satu permasalahan bersama bukanlah hal yang asing, apalagi seperti filsafat. Heidegger sebenarnya bergerak murni di wilayah filsafat, namun jelas bahwa latar belakang jamannya dan akses ke depan menjadikan teori yang dia bangun – seperti halnya pemikir lain – harus bersinggungan dengan ilmu lain. Metafisika Heidegger telah dimaknai sedemikian rupa sehingga meresap ke dalam ilmu-ilmu lain. Bahkan Heidegger sendiripun memaknai metafisika juga sebagai *onto-theo-logic*:

When metaphysics thinks of beings with respect to the ground that is common to all beings as such, then it is logic as onto-logic. When metaphysics thinks of beings as such as a whole, that is, with respect to the highest being which accounts for everything, then it is logic as theo-logic (Heidegger, 1969: 139).

Dalam kalimat tersebut dua istilah penting perlu dicatat di sini.

the ground → *onto-logic*
highest being → *theo-logic*

Ini menyiratkan pengkategorian Heidegger terhadap pola pikir metafisika yang memiliki konsekuensi tidak hanya di tingkat struktur logis atau status ontologis suatu prinsip yang dibahas metafisika, namun juga dimensi praksis. Pancasila memiliki inti sila-sila yang secara ontologis memang dapat berdiri sendiri sebagai konsep universal (misalnya kemanusiaan), namun secara struktur logis dalam sistem bulat Pancasila masing-masing konsep universal ini mengabdikan pada cakrawala kemengadaan ke-Indonesiaan. Konsep Tuhan tentu memiliki status ontologis di puncak piramida yang menjiwai sila-sila di bawahnya, diikuti dengan konsep manusia, satu, rakyat dan adil (lihat Notonagoro, 1962). Teologis dalam arti pemikiran berketuhanan ada dalam konsep *founding fathers* kita dan layak kita pertahankan menghadapi serbuan dunia teknokratis dan sekuler yang sering menawarkan “eksistensi” tanpa Tuhan.

3. Kajian “Praktis” Metafisika

Masalah dasar filsafat, “ada sebagaimana adanya” (*being as such*) tidak memadai lagi untuk didekati secara terpisah dari permasalahan manusia (Horkheimer, 1974: 1). Inilah hal tersulit dalam merefleksikan Pancasila dari sudut pandang metafisika: menyatukan antara metafisika dengan kajian praktis. Tetapi bukankah Pancasila memiliki kandungan teoritis yang sedalam dan seluas kandungan/implikasi praktis? Permasalahan manusia adalah permasalahan yang dinamis dan organis. Metafisika tentu mengikapinya dengan “cara baru bermetafisika”. Penulis menggunakan “*Postmetaphysical Thinking*” dari Jurgen Habermas untuk meneropong dimensi praktis berrefleksi metafisika atas Pancasila ini.

Dalam pendekatan pragmatis, konsep atau gagasan tentang dunia tidak lagi memperhitungkan suatu kesadaran monologis, namun oleh interaksi subjek-subjek yang melahirkan validitas pengakuan dalam tindakan komunikatif (Habermas, 1992: ix-x). Setidaknya ini bisa diasalkan dari pergeseran paradigma dari “pengetahuan tentang objek” kepada paradigma “pemahaman timbal balik antara subjek yang berwicara dan bertindak” (Habermas, 1987: 295-296). Masyarakat komunikatif inilah yang dituju

konsep pragmatis “metafisika” Habermas. Pancasila harus diletakkan dalam konteks pemahaman yang baru, yakni dalam konteks komunikasi intersubjektif (dalam wacana ilmu politik: demokrasi).

Bukan suatu kebetulan jika Husserl dengan fenomenologi transendentalnya juga menyeruakkan istilah inter-subjektif sebagai tolok ukur kebenaran. Penulis menggagas pertemuan kedua pemikir besar dari tradisi berbeda ini untuk memperkaya bahan refleksi Pancasila.

Komunikasi inter-subjektivitas sesungguhnya menjadi prasyarat bagi kebenaran inter-subjektivitas fenomenologis. Melalui dialog yang membudaya, masyarakat Indonesia diyakini akan mampu menciptakan komunikasi yang intens inter-subjektif, dan melalui komunikasi inter-subjektif inilah pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai *The Five First Principles* semakin menunjukkan kualitas yang afirmatif sekaligus kritis. Timbal baliknya, dalam komunikasi yang menentukan pemahaman tersebut, Pancasila merupakan prinsip pertama yang harus digunakan sebagai semangat ataupun *guiding ideal*.

Pancasila sebagai *guiding ideal* merupakan “utopia relevan” yang secara normatif mengarahkan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang menjamin adanya “kelangsungan hidup”, “penghargaan terhadap martabat manusia”, dan “kebebasan” (Sastrapatedja, 1986: 299). Kebenaran tentang Pancasila bukan lagi terletak pada ”realitas objektif” baik mengatasi ataupun di dalam individualitas manusia Indonesia, melainkan ada berproses bersama dalam “realitas Indonesia” yang bersifat aktual, organis dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Besar, 1994, **Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi)**, Panitia Seminar nasional “Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi”, 16-17 November 1994, UGM, Yogyakarta.
- Bahar, S., dkk., (ed.), 1992, **Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945**, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- O’Connor, B., 1987, *Overcoming the Heideggerian Critique of Metaphysical $\sigma\upsilon\sigma\iota\alpha$* , dalam *The Metaphysics of Substance*, Daniel O. Dahlstrom (ed), Vol. LXI, The American Catholic Philosophical Association, Washington DC.
- Dibyasuharda, 1990, **Dimensi Metafisik dalam Simbol, Ontologi Mengenai Akar Simbol**, Disertasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Habermas, Jurgen, 1987, *The Philosophical Discourse of Modernity*, Polity Press, Cambridge.
- _____, 1992, *Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays*, transl. by William Mark, Polity Press, Cambridge.
- Heidegger, M., 1962, *Being and Time*, transl. by Macquarrie, J., & Robinson, E., Harper & Row, New York.
- _____, *Identity and Difference*, transl. by Joan Stambaugh, Harper & Row, New York.
- _____, 1971, *Letter on Humanism*, transl. by Edgar Lohner, in *Philosophy in the Twentieth Century*, Vol. III, William Barrett and Henry D. Aiken, Harper & Row, New York.
- _____, *The Way Back Into The Ground of Metaphysics*, transl. by Walter Kaufmann, idem.
- _____, 1972, *Summary of Seminar on The Lecture ‘Time and Being’* dalam *On Time and Being*, trnsl. By Joan Stambaugh, Harper & Row, New York.
- Horkheimer, Max, 1974, *Critique of Instrument Reason*, transl. by Matthew J O’Connell and others, Continuum, New York.
- Howard, Roy, L., 1982, *Three Faces of Hermeneutics, An Introduction of Current Theories of Understanding*, University of California Press, Berkeley.

- Husserl, E., 1970, *The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology*, transl. by D. Carr, Evanston, IL.
- _____, 1982, *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy*, transl. by F. Kersten, The Hague.
- Jones, W.T., 1975, *The Twentieth Century to Wittgenstein and Sartre*, Hartcourt Brace Jovanovich, San Diego.
- Lemay E., & Pitts, J.A., **Heidegger untuk Pemula**, alih bahasa P. Hardono Hadi, Kanisius, Yogyakarta.
- Luijpen, William A., OSA, 1960, *Existensial Phenomenology*, Duquesne University Press, Louvain.
- Sastrapratedja, dkk., ed., 1986, **Menguak Mitos-Mitos Pembangunan: Telaah Etis dan Kritis**, Gramedia, Jakarta.
- Sontag, F., 1970, *Problems of Metaphysics*, Chandler Publishing Company, New York.
- White, A.R., 1987, *Methods of Metaphysics*, Cromm Helm, London.